

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian Indonesia menghasilkan bahan pangan bagi masyarakat yang kemudian memberikan kontribusi pada bidang ekonomi melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2020). Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era industri 4.0 semakin mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani (Khaerunnisa., & Salampessy, 2021. h. 105). TIK memberikan kontribusi kepada petani untuk memahami sistem pertanian serta menjawab tantangan jaman. Kemajuan TIK yang didukung oleh peran dari pemangku kepentingan dapat memudahkan pertumbuhan pertanian Indonesia (Eastwood, *et al.* 2019; Arifin, 2021). Pertanian kemudian menjadi sebuah sistem yang berkesinambungan dengan pemanfaatan SDM dan SDA serta berkolaborasi dengan teknologi yang semakin berkembang (Sidharta, Tambunan, Azwar, dan Ghaniyyu, 2021, h. 229).

Berubahnya situasi dan kondisi global berpengaruh pada kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian, misalnya kebijakan pertanian yang kemudian berorientasi pada penggunaan teknologi atau disebut juga dengan *smart farming* (Rachmawati, 2021. h. 137). Di Indonesia, terdapat program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) yang digagas Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) pada tahun 2019 oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo. Program ini menerapkan inovasi dalam rangka menciptakan pusat data dan informasi pertanian sebagai pusat dari gerakan

pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, serta pusat pengembangan jejaring kemitraan sektor pertanian (Suhendri, 2021).

Model pelaksanaan Kostratani dilakukan secara bertingkat ke daerah melalui satu instruksi atau komando dari Menteri Pertanian. Pada tingkat pusat yang berkedudukan di Kementerian Pertanian RI, program Kostratani diberikan sebutan dengan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Nasional (Kostranas) sebagai pengendali dan monitor; pada tingkat provinsi disebut dengan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Wilayah (Kostrawil); dan pada tingkat daerah/kabupaten disebut Komando Strategis Pembangunan Pertanian Daerah (Kostrada). Poin penting dari Program Kostratani terletak pada pelaksanaan di tingkat kecamatan, karena pada titik inilah Kostratani akan menyentuh petani secara langsung. Balai Penyuluh Pertanian (BPP) menjadi markas pelaksanaan Kostratani di Kecamatan, dengan penyuluh sebagai operator.

Keberlangsungan program pertanian Indonesia tidak terlepas dari penggunaan instrumen (alat) seperti media massa, alat peraga, bahkan media sosial (Kinasih, 2021) yang diharapkan mampu memberikan percepatan serta efisiensi dalam pelaksanaan praktik pertanian. Dengan demikian, salah satu titik berat pembangunan pertanian di Indonesia terletak pada penggunaan inovasi dan teknologi tepat guna diikuti kualitas dan kuantitas SDM, seperti petani dan penyuluh pertanian. Era modernisasi pertanian, disebut juga pertanian 4.0, yang bertumpu pada teknologi dan inovasi (Ikhsani, *et al.* 2020; Simarmata, 2019, h. 4). Internet menjadi saluran yang mapan bagi kebanyakan jenis media, baik itu media cetak atau elektronik terintegrasi ke dalam *platform* digital akibat dari tumbuh berkembangnya internet (Wirtz, 2020. h. 1).

Modernisasi merupakan proses perubahan dari tradisional menjadi lebih modern guna mencapai hasil yang lebih baik dengan cara yang lebih efisien. Modernisasi pada pertanian sejatinya telah dimulai dengan penggunaan mesin untuk mengemburkan tanah maupun pembasmian hama otomatis (Rifkian, Suharso, & Sukidin, 2017). Meski demikian, perkembangan teknologi tidak hanya berpengaruh pada teknis bertani semata, tetapi turut mendorong penyuluhan pertanian untuk beradaptasi dan memanfaatkan TIK (Rusmono, 2021). Dengan demikian, cara penyuluh pertanian dalam menyebarkan dan mendistribusikan informasi kepada petani tentu mengalami pergeseran, misalnya telah dapat dilakukan melalui internet seperti penggunaan media sosial.

Pergeseran model penyuluhan dengan menggunakan TIK menghadapi sejumlah masalah, munculnya istilah *digital divide* atau ketimpangan digital yang melatarbelakangi terbatasnya pemanfaatan TIK di sektor pertanian. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor munculnya *digital divide*, mulai dari sarana dan prasarana TIK (*device*, internet) yang kurang mendukung di desa wilayah pertanian hingga kemampuan dan kebiasaan petani serta penyuluh yang kurang terbiasa menggunakan internet atau media digital dalam pola pertanian maupun penyuluhan. Petani padi di Kabupaten Klaten masih terbiasa menggunakan pola turunan dalam hal pengelolaan sawah, pola ini dilakukan secara turun temurun, artinya tanpa menggunakan teknologi digital dan internet sudah dapat melakukan budidaya padi. Sedangkan dari sisi penyuluh, model penyuluhan dengan cara bertatap muka serta interaktif lebih cenderung dapat diterima dari pada penyuluhan model *online* atau *virtual*. Meski demikian dalam penyuluhan tatap muka, sering penyuluh mengajak petani untuk mempelajari video, foto atau materi dalam internet tentang

pengelolaan sawah, misalnya cara penanaman, budidaya bibit padi menggunakan *tray*, penanganan hama hingga pasca panen. Namun sejauh ini, penyuluh hanya membagikan *link* internet kepada petani dan belum membuat ujicoba atau praktik demo plot seperti yang ditayangkan dalam media digital. Kemampuan ekonomi petani juga mempengaruhi dalam penggunaan media digital, dalam hal ini petani dituntut menggunakan *device* dan kuota data untuk mengakses teknologi informasi. Ditambah lagi dengan dana atau biaya penyuluhan yang dibatasi oleh Pemerintah daerah misalnya untuk peningkatan kapasitas kompetensi penyuluh dalam bidang TIK. Penyuluh pertanian berperan besar dalam transfer teknologi, fasilitator, serta penasihat (Setiana, Nuskhi, & Hidayat, 2021).

kapasitas ekonomi petani serta dukungan yang belum optimal dalam pembiayaan penyuluhan pertanian turut menyulitkan pelaksanaan model penyuluhan dengan TIK (Rusmono, 2021; Ramayana, 2022).

Peneliti memilih Kelompok Petani Padi di Klaten menjadi subjek penelitian karena Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah penunjang ketahanan pangan nasional dengan mengunggulkan pertanian sebagai sektor unggulan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022). Di sisi lain, pelaksanaan program Kostratani dalam Kelompok tani Padi di Klaten terdapat kesenjangan karena belum sepenuhnya tercipta integrasi antara SDM, SDA, dan teknologi yang mempengaruhi hasil pembangunan pertanian. Peneliti fokus pada proses komunikasi yaitu penyebaran (atau selanjutnya disebut difusi) inovasi dalam program Kostratani yang dilakukan oleh Badan Penyuluh Pertanian (BPP) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tingkat kecamatan pada kelompok tani padi.

Penggunaan TIK dalam pertanian di Klaten sejatinya merupakan salah satu wujud pembangunan yang didefinisikan sebagai perubahan sosial di mana suatu gagasan baru diperkenalkan ke dalam suatu sistem sosial guna mencapai hal yang

lebih baik dan besar, misalnya pendapatan yang lebih besar dan kualitas hidup yang lebih baik. Di sisi lain, komunikasi dalam pembangunan memiliki peran penting yang merupakan upaya, cara, maupun teknik penyampaian gagasan serta keterampilan pembangunan yang digunakan oleh penggerak pembangunan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam pembangunan (Wardhani, 2002; Pramono, 2016; Mulyadi, Didan, & Patimah, 2020).

Difusi inovasi dalam bidang pertanian menyajikan kebaruan ide dan gagasan yang disampaikan oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan PPL kepada petani padi di Kabupaten Klaten. Kebaruan tersebut salah satunya muncul dari praktik penyuluhan oleh PPL dengan penggunaan media digital (TIK) serta adanya gagasan baru (inovasi) tentang varietas padi Srinuk (IP4) yang merupakan intervensi dari pihak luar, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Klaten dengan Badan Teknologi Nuklir Nasional (BATAN) kepada kelompok tani padi yang tergabung dalam program Kostratani. Inovasi padi Srinuk (IP4) melatarbelakangi adanya pergeseran model penyuluhan PPL kepada kelompok tani, perubahan pola tanam, persiapan lahan, perawatan tanaman hingga panen. Penelitian ini kemudian dilakukan guna melihat difusi inovasi dari program Kostratani yang dijalankan PPL (penyuluh) kepada Kelompok Tani Padi—terlebih pelaksanaan program tersebut belum maksimal—dengan menggunakan konsep serta teori Difusi Inovasi dan Komunikasi Pembangunan.

Teori Difusi Inovasi memperkuat peneliti untuk menjelaskan alur penyebaran pesan gagasan khususnya inovasi padi Srinuk (IP4) dalam program Kostratani di kelompok tani padi Kabupaten Klaten, serta membantu menjelaskan saluran

komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan gagasan tersebut hingga pada tahap keputusan adopsi.

Inovasi adalah sebuah ide, praktik, atau proyek yang dianggap baru oleh seorang individu atau unit adopsi lainnya (Rogers, 2003. h. 12).

Definisi Rogers tentang difusi mengacu pada proses inovasi yang dikomunikasikan melalui saluran dan waktu tertentu kepada anggota dalam sistem sosial (Rogers, 2003, h. 5). Bahwa inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial adalah empat komponen kunci dari difusi inovasi yang menegaskan bahwa keputusan adopsi atau menolak adopsi inovasi merupakan keputusan anggota (Rogers, 2003. h. 177). Dalam program Kostratani, peneliti tidak menilai mengenai keberhasilan program tersebut apakah program inovasi yang ditawarkan dalam Kostratani diterima atau ditolak oleh petani. Peneliti memilih untuk mengamati pendekatan komunikasi dalam teori Difusi Inovasi pada program Kostratani, yang meliputi penyebaran inovasi padi Srinuk (IP4) dan penggunaan TIK sebagai saluran komunikasi yang digunakan selama program yaitu lima tahun dalam penyelenggaraan Kostratani (2019 – 2024) dan pada sistem sosial yaitu kelompok tani padi di Kabupaten Klaten.

Program Kostratani yang merupakan pendekatan tentang pembangunan pertanian memiliki konsep sebagai proyek yang dijalankan Pemerintah untuk keberlanjutan dan perkembangan sektor pertanian Indonesia. Dengan demikian pendekatan komunikasi pembangunan digunakan peneliti untuk melihat lebih dekat mengenai peran kedua belah pihak (Pemerintah dan petani) dalam proses pembangunan pertanian melalui aspek persuasif, partisipatoris hingga pemberdayaan yang dilakukan oleh PPL (penyuluh) kepada petani sebagai subyek/pelaku pembangunan pertanian.

1.2. Rumusan Masalah

Kostratani merupakan program pembangunan pertanian yang diharapkan mampu menjawab tantangan pertanian berkaitan dengan ketahanan pangan memiliki proses komunikasi intens antara sumber dan *receiver* dengan menggunakan saluran komunikasi yang ada (Kementan, 2019). Tantangan dalam pelaksanaan Kostratani lebih banyak disoroti pada sisi penyampaian dan penyebaran (difusi) inovasi berkaitan dengan ide dan gagasan Kostratani pada kelompok tani. Praktik komunikasi yang dilakukan BPP dan PPL dengan petani dikaji pada aspek proses penyebaran inovasi yang terdiri dari: *knowledge*, *persuasion*, *decision*, *implementation* dan *confirmation*. Oleh sebab itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana difusi inovasi dalam program Kostratani pada kelompok tani padi di Kabupaten Klaten?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menampilkan dan menjelaskan proses dan permasalahan komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan program Kostratani. Dalam hal ini terletak pada penyampaian dan penyebaran (difusi) inovasi yang diduga mengandung persoalan baik itu dari sumber, pesan inovasi, saluran maupun penerima dan respon dari masyarakat (petani) dalam program Kostratani yang dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan atau Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Guna mencapai tujuan penelitian, peneliti perlu menganalisis komponen yaitu mendeskripsikan serta menganalisis difusi inovasi pada program Kostratani yang dilaksanakan pada kelompok tani padi di Kabupaten Klaten.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis secara pribadi, tetapi juga membawa manfaat baik secara akademis maupun praktis sebagai berikut.

1. Manfaat akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kesenjangan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain di kemudian hari.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai implementasi difusi inovasi pada program Kostratani di kelompok petani padi di Kabupaten Klaten.